

7 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Peristiwa 1965 - 1966

Merupakan peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia setelah terjadi Peristiwa Gerakan 30 September. Peristiwa itu mewarnai masa transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto.

Penembakan Misterius

Operasi rahasia sekitar 1982 hingga 1985 menanggulangi tingkat kejahatan yang cukup tinggi pada saat itu. Pelaku operasi rahasia tersebut tidak pernah diketahui.

Penculikan Aktivistis 1997/1998

Peristiwa penghilangan orang secara paksa terhadap aktivis prodemokrasi menjelang pelaksanaan Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR dan 1998. Tercatat sekitar 23 aktivis dinyatakan hilang pada saat itu.

Tragedi Trisakti

Peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 12 Mei 1998 itu menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti.

Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan rasial terhadap etnik Tionghoa yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lain pada 13-15 Mei 1998 tersebut berujung pada mundurnya Presiden Soeharto.

Tragedi Semanggi I

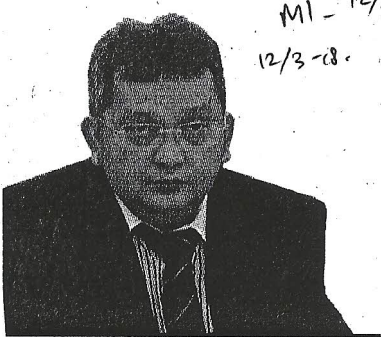
Aksi demonstrasi menolak Sidang Istimewa MPR 1998 dan menentang dwifungsi ABRI/TNI. Aksi yang berlangsung pada 11-13 November 1998 tersebut diwarnai keributan antara peserta demo dan aparat yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil.

Tragedi Semanggi II

Aksi demo yang berlangsung pada 24 September 1999 tersebut kembali diwarnai keributan antara peserta demo dan aparat serta menyebabkan seorang mahasiswa UI tewas.



Pemerintah Pasti Bisa Selesaikan



MI/M IRFAN

Trimedya Panjaitan

Wakil Ketua Komisi III DPR

Bagaimana Komisi III menilai penyelesaian kasus pelanggaran HAM selama ini?

Berbagai upaya sudah dan sedang dilakukan. Pasti aspirasi soal pelanggaran HAM akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Tahun pertama beliau sibuk konsolidasi politik, kan ada dua koalisi di DPR cukup melelahkan bagi beliau. Tahun kedua, beliau membenahi ekonomi. Seharusnya tahun ini beliau akan lebih serius soal kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu akan menjadi investasi politik. Karena di dalam Nawa Cita juga disampaikan bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu harus dituntaskan.

Anda yakin bahwa Nawa Cita menjadi dokumen yang akan dilaksanakan?

Saya kira akan dilaksanakan. Ada sejumlah orang yang menjadi saksi-saksi sejarah ada yang sudah meninggal. Ini harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk segera menyelesaikan ini. Kalau saksi-saksi sejarahnya sampai meninggal, akan lebih sulit lagi dalam mengungkapkannya.

Banyak yang menilai penyelesaian kasus HAM mandek. Mengapa?

Ya, sebetulnya kita tahu ini tidak mudah. Kasus-kasus pelanggaran HAM ini muatan politisnya kuat. Tentu banyak orang di sekitar Presiden yang tidak ingin atau terganggu kepentingannya kalau ini terungkap meski ada korban. Untuk itulah, harus kita 'kepung' dan tidak boleh putus asa. Yang penting kasus itu terungkap, tapi mulainya dari mana. Sama seperti kasus 27 Juli 1996, itu kan yang kena malah *cecoronya*. Pelaku utamanya harus terungkap dan diadili.

Soal perdebatan mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, apakah secara yudisial atau nonyudisial?

Penyelesaian kasus HAM dengan cara nonyudisial perlu dipertimbangkan karena kenyataannya selama ini, antara penyidik Komnas HAM dan penyidik Kejaksaan Agung mengalami hambatan yuridis, terutama menyangkut pemenuhan alat bukti sebagaimana diatur UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc. Namun, tentu harus dengan nuansa tidak saling menyalahkan, tidak lagi menyulut kebencian atau dendam, dan juga yang penting tergambar kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan tragedi tersebut.

Haruskah kita tetap optimistis menunggu?

Saya kira dengan bantuan pers dan opini yang cukup kuat, Presiden akan punya semangat. Opini itu penting dan diperlukan oleh kepala negara. *Pressure* oleh *civil society* akan menjadi kekuatan Presiden. (Nov/P-2)

Berharap di Tengah Kecemasan

MI - 12/3/18

Di tengah rasa pesimistis yang mendalam, keluarga korban tetap berharap agar kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat diselesaikan oleh pemerintah.

RUDY POLYCARPUS

rudy@mediaindonesia.com

SUMARSIH, ibu korban Tragedi Semanggi I Bernardus Realino Norma Irmawan (Wawan), semakin pesimistis akan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia. Ia menilai di bawah pemerintahan siapa pun, pengungkapan kasus pelanggaran HAM akan tetap berjalan di tempat.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Padahal, ia sangat berharap pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Sayangnya, sejauh ini tidak ada perkembangan berarti dalam penuntasan kasus-kasus HAM. Jokowi masih memprioritaskan program-program pembangunan infrastruktur. Soal penuntasan kasus HAM masih belum jadi prioritas rupanya," ujar di Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang terberingkalai seperti pelanggaran HAM selama peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Semanggi I dan II, serta pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Sumarsih menyalahkan sikap pemerintah. Padahal, salah satu janji pasangan Jokowi-JK pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2014 ialah menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu. "Kami ingin penyelesaian kasus HAM masa lalu jangan hanya dijadikan janji politik saat kampanye," pinta Sumarsih.

Di tengah ketidakpastian, perempuan 65 tahun itu mengaku kerap

merasa pesimistis bercampur optimistis karena makin banyak anak muda yang peduli pada apa yang mereka perjuangkan.

Ia mengisahkan, pada aksi kamisan ke-517 pada 7 Desember tahun lalu, Presiden Jokowi mengajak orangtua korban bertemu, tetapi ditolak. Pertemuan itu batal karena orangtua korban lebih memilih mengikuti aksi Kamisan.

"Kami ingin penyelesaian kasus HAM masa lalu jangan hanya dijadikan janji politik saat kampanye."

Sumarsih
Orangtua korban

"Kami tolak tawaran itu, kami lebih memilih untuk ada di luar Istana. Aksi kamisan kala itu bersamaan dengan peluncuran Amnesty International Indonesia (AII). Ini ialah sebuah simbol harapan dari gerakan masyarakat yang lebih penting," tandasnya.

Sebenarnya, kata dia, penolakan itu bukan karena orangtua korban tidak mau bertemu Presiden Jokowi. Awalnya, pertemuan direncanakan pukul 11.00 WIB. Namun, diundur menjadi pukul 16.00 WIB. Para orangtua yang sudah berada di Istana Bogor sejak pagi memutuskan untuk kembali ke Jakarta guna menggelar aksi kamisan.

Sementara itu, Paian Siahaan, ayah dari Ukok Munandar Siahaan, korban penculikan Mei 1998, berharap ada undangan lagi dari Presiden. Pausalnya, ia masih menunggu kepastian mengenai putranya yang sudah 19 tahun menghilang. "Kami butuh kejelasan. Apakah dia masih hidup atau sudah tidak ada," ujarnya.

Ketidakjelasan status Ukok membuat Paian dan sang istri, Damaris Hutabarat, masih berharap putranya masih hidup. Ketidakjelasan itu juga yang membuat sang istri sakit-sakitan. Saat ini saja Damaris harus duduk di kursi roda untuk dapat hadir di aksi kamisan.

Semakin hari, Paian semakin pesimistis anaknya masih hidup. Namun, ia butuh kejelasan untuk mendoakan anaknya apabila memang sudah meninggal. "Kalau belum meninggal, kami hanya takut dosa karena mendoakan orang yang masih hidup," pungkasnya.

Utang sejarah

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan yakin aspirasi soal pelanggaran HAM akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. "Tahun pertama beliau sibuk konsolidasi politik, kan ada dua koalisi di DPR cukup melelahkan bagi beliau. Tahun kedua, beliau membenahi ekonomi. Seharusnya tahun ini beliau akan lebih serius soal kasus pelanggaran HAM," katanya.

Langkah itu, kata dia, akan menjadi investasi politik karena di dalam Nawacita juga disampaikan bahwa kasus pelanggaran HAM masa lalu harus dituntaskan. "Saya kira pada saat yang tepat pemerintah akan menuntaskan kasus yang menjadi utang sejarah itu." (P-2)

Korban Tetap Menunggu



MI - 12/3/18.

MI/M IRFAN

Putri Kanesia

Wakorbid Advokasi Kontras

Bagaimana Kontras melihat upaya penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu?

Itu sebenarnya menjadi salah satu yang dilakukan Presiden. Namun, ini jelang habis masa kepemimpinan justru belum ada satu kasus pun yang ditindaklanjuti ke tingkat penuntutan dan pengadilan HAM *ad hoc*, terutama kasus yang dikategorikan sebagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

Artinya, belum mampu menjawab komitmen penyelesaian kasus HAM?

Kalau mau ditanya sejauh mana komitmen pemerintah terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, saya pikir memang tidak ada. Bahkan, pemerintah lebih banyak bertemu dengan ahli hukum dan kurang memperhatikan keluarga korban.

Kenapa bisa menyimpulkan demikian?

Contoh konkret, setiap Kamis keluarga korban pelanggaran HAM berat selalu menyelenggarakan aksi kamisan di depan Istana Presiden. Namun, tidak pernah ada yang menemui ibu-ibu yang menggelar aksi itu. Ini membuktikan bahwa janji penuntasan kasus HAM hanya sekadar simbol.

Lalu, bagaimana solusi untuk menuntaskan kasus tersebut?

Kami berharap Presiden bisa mengambil satu inisiatif untuk memecah kebuntuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Misalnya, mengeluarkan perpres tentang pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* karena selama ini problemnya semacam ada pimpong. Komnas HAM merasa tugasnya sebagai lembaga untuk menyelidiki sudah dilakukan dan hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung merasa dokumen itu belum lengkap dan belum ada pengadilan HAM *ad hoc* sehingga tidak mau menindaklanjuti lebih jauh dengan penuntutan."

Dalam penilaian Kontras mengapa kasus ini lamban diselesaikan?

Ada banyak faktor. Contoh, kasus pelanggaran HAM 1965 sudah banyak korban dan pelaku meninggal sehingga kesulitan jika dibawa ke pengadilan karena terkait kesaksian dan barang bukti. Kemudian, untuk kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang memang terduga pelakunya masih duduk di pemerintahan sehingga sulit bagi Komnas HAM dan Kejaksaan Agung menindaklanjutinya. Namun, kita harus tetap optimistis karena itu penting untuk bisa menjaga harapan korban. Kalau pesimistis, ya kasihan korban yang sudah lama menanti. Saya pikir masih ada waktu bagi pemerintah. (Gol/P-2)